

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa) DAN DANA DESA
(DD) TERHADAP BELANJA DESA BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DENGAN JUMLAH PENDUDUK SEBAGAI
VARIABEL PEMODERASI
(Studi pada Perubahan Alokasi Anggaran Desa-Desa di Kabupaten
Wonogiri Tahun 2016 dan 2017)**



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

DAMAR NUR FATHURROHMAN

B200 140 055

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa) DAN DANA DESA (DD)
TERHADAP BELANJA DESA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DENGAN JUMLAH PENDUDUK SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

**(Studi pada Perubahan Alokasi Anggaran Desa-Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun
2016 dan 2017)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

DAMAR NUR FATHURROHMAN

B200140055

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



(Andy Dwi Bayu Bawono, Ph.D)

NIK/NIDN. 977/0621017901

HALAMAN PENGESAHAN

**“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa) DAN DANA DESA (DD)
TERHADAP BELANJA DESA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DENGAN JUMLAH PENDUDUK SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
(Studi pada Perubahan Alokasi Anggaran Desa-Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun
2016 dan 2017)”**

Oleh:

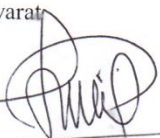
DAMAR NUR FATHURROHMAN

B 200140055

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 07 Agustus 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Andy Dwi Bayu Bawono, Ph.D
(Ketua Dewan Penguji)

()

2. Fauzan, SE, M.Si
(Anggota 1 Dewan Penguji)

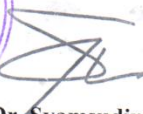
()

3. Dra. Rina Trisnawati M.Si, Ph.D, Ak
(Anggota 2 Dewan Penguji)

()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



()
(Dr. Svamsudin, MM)
NIDN. 017025701

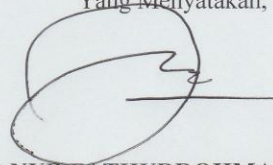
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya..

Surakarta, 07 Agustus 2018

Yang Menyatakan,



(DAMAR NUR FATHURROHMAN)

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa) DAN DANA DESA (DD)
TERHADAP BELANJA DESA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DENGAN JUMLAH PENDUDUK SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

**(Studi pada Perubahan Alokasi Anggaran Desa-Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun
2016 dan 2017)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan Dana Desa (DD) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Pemoderasi di Kabupaten Wonogiri Perubahan tahun Anggaran 2016 dan 2017. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan seluruh Desa yang ada di Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini sampling dengan kriteria-kriteria tertentu. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, mengumpulkan data diolah 64 sampel Desa. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan Analisis Regresi Moderat (MRA), yang diolah dengan menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 22.00 perangkat lunak. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan menunjukkan bahwa PADesa, DD, dan Jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan hasil pengujian secara parsial PADesa dan Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, tetapi DD berpengaruh secara negative signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Jumlah Penduduk tidak mampu memoderasi Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan Dana Desa (DD).

Kata Kunci: Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Jumlah Penduduk, dan Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of the Village Original Revenue (PADesa) and Village Fund (DD) on Village Expenditure Allocation of Community Empowerment by using Total Population as Moderating Variable in the Wonogiri Regency in Fiscal Year 2016 and 2017. This research uses an entire village in Wonogiri Regency as a population and by using purposive sampling method, this study gather 64 villages of sample. The analysis used in this study is Multiple Linear Regression Analysis and Moderate Regression Analysis (MRA) were used in this study, which is processed by using SPSS version 22.00. The simultant test result shows PADesa, DD, and Total population significantly influence the Allocation of Village Expenditure on Community Empowerment. While the partial test shows that PADesa and the total population have not influence the Village Expenditure Allocation on Community Empowerment, however, this study found that DD has a significant negative effect on the Village Expenditure Allocation on Community Empowerment, and this Population was not able to moderate the Village Original Revenue (PADesa) and the Village Fund (DD).

Keywords: Village Original Income (PADesa), Village Fund (DD), Total Population and Village Expenditure Allocation for Community Empowerment.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014) Menyatakan “Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014) Menyatakan “Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014, menjadikan Desa tidak lagi sebagai Obyek pembangunan, akan tetapi menjadi subyek Pembangunan. Selain itu Desa juga mendapatkan Hak dan kewajiban untuk mengatur sistem Pemerintahan sendiri. Selanjutnya, Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU No. 23 Tahun 2014) tentang Pemerintah Daerah telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui 3 (tiga) jalur, meliputi: Peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, sehingga untuk mengemban misi dimaksud desa memiliki kedudukan dan peranan yang strategis sebagai unit organisasi pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 menjelaskan tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya pembangunan desa penting untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan social. Pembangunan desa juga harus melalui beberapa tahapan, terdiri dari: (i) perencanaan pembangunan Desa; (ii) pelaksanaan pembangunan Desa; (iii) pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa.

Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2017 jumlah penduduk miskin sebesar 12,90 % atau 123.04 Jiwa (<https://wonogirikab.bps.go.id/>). Melihat angka yang cukup tinggi

seharusnya Desa-Desa di Kabupaten Wonogiri dapat menjalankan program dari program pemerintah yang mana dapat menurunkan tingkat kemiskinan menggunakan program Pemberdayaan Masyarakat sesuai amanat Undang – Undang, Oleh karena itu tentunya penyelenggaraan pembangunan akan membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan Desa. Penerimaan Desa diantaranya meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa), yaitu Pendapatan yang berasal dari desa itu sendiri. Selanjutnya Penerimaan Transfer, yaitu penerimaan yang berasal dari transfer pemerintah Pusat maupun Daerah dan Pendapatan Lain-lain, yaitu penerimaan lainnya yang sah.

Prioritas penggunaan Dana Desa dapat disimpulkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan Bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat. Menurut Widjaja (2003:169) Pemberdayaan Masyarakat ialah upaya dalam meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga dapat mewujudkan jati diri harkat dan martabat untuk bertahan dan mengembangkan diri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pembangunan pedesaan seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat, karena untuk mewujudkan Kemandirian desa harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas.

Masyarakat atau Penduduk dalam pemberdayaan masyarakat adalah sasaran yang akan dituju, harapannya dalam upaya peningkatan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah, masyarakat dapat merasakan dampak dari kegiatan tersebut. Besarnya Jumlah penduduk akan berhadapan dengan seberapa cepat kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan serta infrastruktur-infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Widiagma, 2015). Secara garis besar bahwa suatu desa yang besar jumlah penduduknya otomatis akan mengeluarkan belanja besar untuk mewujudkan kesjahteraan bagi masyarakatnya. Salah satu fenomena dalam topik pasca berlakunya undang-undang desa yang menarik untuk diteliti yaitu adakah pengaruh peningkatan penerimaan Desa terhadap belanja desa guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada dasarnya Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Mucharomah dan Zulfikar (2018) dengan perbedaan periode waktu, dan adanya penambahan Variabel Pemoderasi yaitu Jumlah Penduduk. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), dan Dana Desa (DD) Terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Jumlah Penduduk sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Perubahan Alokasi Anggaran Desa-Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 dan 2017)”**.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kuantitatif, dimana data diperoleh dari angka, skor, dan analisisnya menggunakan statistik, dengan melakukan uji hipotesis yang menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). MRA merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan mengandung unsur interaksi, yaitu Perkalian dua atau lebih variabel independen (Ghozali, 2011:150).

2.2 Populasi Penelitian dan Sampel penelitian

Sugiyono (2010) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sampel yang digunakan adalah Desa-desa se-Kabupaten Wonogiri yang mengumpulkan APBDes Tahun Anggaran 2016 dan 2017. Kabupaten Wonogiri dari 25 kecamatan yang memiliki 251 desa dan 43 kelurahan (<http://jateng.bps.go.id/>).

Pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria- kriteria tersebut yaitu (1) Desa-desa yang terletak di Kabupaten Wonogiri, (2) Desa-desa yang telah mengumpulkan Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2016 dan 2017 dengan Lengkap dan (3) Data Belanja Desa yang digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat.

2.3 Data dan Sumber Data

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan di semua desa yang ada di Kabupaten Wonogiri Tahun 2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sugiyono (2010) berpendapat bahwa Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen dan biasanya disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau mengenai topik penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonogiri.

2.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi kepustakaan.

2.5 Definisi dan Oprasional Variabel

a. Variabel Dependen

Perubahan Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Desa dan PDT (Permendes) No. 21 Tahun 2015 yang telah disahkan pada akhir 2015 tentang prioritas DD tahun 2016. Secara umum prioritas penggunaan DD ditunjukkan dua bidang yaitu bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri Menurut UU No. 6 Tahun 2014 ialah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Dalam penelitian ini Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat diketahui dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016 dan 2017.

$$\Delta \text{BPM} = \text{BPM 2017} - \text{BPM 2016}.$$

b. Variabel Independen

Perubahan Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pernerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71).

$$\Delta \text{PADesa} = \text{PADesa 2017} - \text{PADesa 2016}$$

Perubahan Dana Desa (DD)

Dalam Pasal 4 Permendes No 22 tahun 2016, disebutkan penggunaan dana desa tahun 2017 diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan dana Desa dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa.

$$\Delta \text{DD} = \text{DD 2017} - \text{DD 2016}$$

c. Variabel Pemoderasi

Jumlah Penduduk

Penduduk adalah warga negara dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sementara yang bukan penduduk adalah orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara (UUD 1945 Pasal 26 ayat 2). Jumlah Penduduk dapat didefinisikan sebagai jumlah orang yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah serta tercatat sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Jumlah Penduduk dalam penelitian ini diambil hanya dari data jumlah penduduk pada tahun 2017, karena jumlah penduduk Wonogiri tidak signifikan perubahannya.

2.6 Metode Analisis Data

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dan MRA. Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Jumlah penduduk terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Analisis MRA digunakan untuk menguji adanya interaksi Jumlah Penduduk dengan Variabel Independen terhadap variabel Dependen. Analisis linear berganda dan MRA dapat dilakukan dengan uji koefisien determinasi, uji t, dan uji F. Model persamaan 1 dalam penelitian ini yaitu :

$$\Delta BPM = a + b_1 \Delta PADes + b_2 \Delta DD + b_3 JP + e \dots \dots \dots (1)$$

Model Persamaan 2 :

$$\Delta BPM = a + b_1 \Delta PADes + b_2 \Delta DD + b_3 JP + b_4 \Delta PADes * JP + b_5 \Delta DD * JP + e \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

1. Δ BPM = Perubahan Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2. Δ PADesa = perubahan Pendapatan Asli Desa
3. Δ DD = Perubahan Dana Desa
4. JP = Jumlah penduduk
5. a = Konstanta Regresi
6. b1,b2,b3,b4,b5 = Koefisien Regresi
7. e = Error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Dana Desa, terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Jumlah Penduduk sebagai Variabel Pemoderasi studi pada Perubahan Alokasi Anggaran Desa-desa Se-Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 dan 2017. Pemilihan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Untuk proses penentuan sampel dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1

Sampel	Jumlah
Desa di Kabupaten Wonogiri	251
Desa yang tidak mengumpulkan laporan Keuangan Tahun 2016 dan 2017	177
Jumlah seharusnya	74
Desa yang tidak memenuhi kriteria karena ekstrim (<i>outlayer</i>)	10
Jumlah sampel yang digunakan dan diolah	64

Sumber data: Data sekunder diolah peneliti, 2018

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan ada beberapa data yang harus di outlier dikarena data tersebut diatas standar deviasi atau data tersebut terlalu ekstrim dan desa yang mengumpulkan laporan anggaran 2016 - 2017 hanya beberapa desa saja. Jadi, total sampel yang bisa diolah sejumlah 64 desa di Kabupaten Wonogiri.

3.1 Pembahasan dan Hasil Analisis

a. Pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Desa (PADesa) terhadap Perubahan Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pada variabel Perubahan Pendapatan Asli Desa (PADesa) terhadap Perubahan Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Hasil uji t hitung diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,074 > 0,05$ sehingga H1 ditolak yang berarti Perubahan Pendapatan Asli Desa (PADesa) tidak berpengaruh terhadap Perubahan Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PADesa Kabupaten Wonogiri tahun 2016 dan 2017 belum digunakan untuk Belanja Bidang pemberdayaan Masyarakat. Pemerintah Kabupaten Wonogiri desa lebih memfokuskan pada pembangunan fisik ataupun infrastruktur seperti jalan, jembatan dan irigasi. Sehingga kemungkinan PADesa itu tidak memfokuskan pada alokasi bidang Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Bramudya Wisnu Wardhana dan Andy Bawono (2017), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian. Pada saat ini Pendapatan Asli Desa (PADesa) digunakan untuk belanja bidang Pembangunan Infrastruktur oleh pemerintah Desa. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Eva Mucharomah dan Zulfikar (2018), yang menyatakan Pendapatan Asli Desa (PADesa) tidak berpengaruh pada Belanja Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat.

b. Pengaruh Perubahan Dana Desa (DD) terhadap Perubahan Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pada variabel Perubahan Dana Desa (DD) terhadap Perubahan Belanja Desa Bidang pemberdayaan Masyarakat. Hasil uji t hitung diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,025 < 0,05$ sehingga H2 diterima yang berarti Perubahan Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap Perubahan Belanja Desa Bidang pemberdayaan Masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa Kabupaten Wonogiri tahun 2016 dan 2017 telah tepat digunakan untuk Belanja Bidang pemberdayaan Masyarakat, namun Dana Desa (DD) yang tinggi banyak digunakan untuk Belanja Pembangunan Infrastruktur. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, Dana Desa merupakan sumber dana desa yang berasal dari anggaran dan belanja Negara di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabuapten/kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa

yang diberikan pada pemerintah pusat digunakan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Eva Mucharomah dan Zulfikar (2018), yang menyatakan Dana Desa (DD) berpengaruh negative signifikan terhadap Belanja Desa Bidang pemberdayaan Masyarakat.

c. Jumlah Penduduk sebagai Variabel Moderasi Perubahan Pendapatan Asli Desa (PADesa) terhadap Perubahan Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pada variabel jumlah Penduduk sebagai pemoderasi Pendapatan Asli desa (PADesa) terhadap Perubahan Belanja Desa Bidang pemberdayaan Masyarakat. Hasil uji t hitung diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,169 > 0,05$ sehingga H_5 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk tidak mampu memoderasi pengaruh perubahan pendapatan Asli Desa (PADesa) terhadap Perubahan Belanja Desa Bidang pemberdayaan Masyarakat. Desa yang memiliki jumlah penduduk banyak atau sedikit, memiliki pendapatan asli desa besar atau kecil. Hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap Alokasi belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, karena Pendapatan Asli Desa (PADesa) dalam belanja biasanya digunakan untuk bidang infrastruktur.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Andri Devita, Arman Delis dan Junaidi (2015) menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh Signifikan terhadap Belanja daerah. Selanjutnya sebelumnya Susi Susanti dan Heru Fahlevi (2016) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara Bersama-sama Berpengaruh terhadap belanja Modal, dan secara terpisah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sehingga diharapkan jumlah penduduk bisa memoderasi Pendapatan Asli Desa (PADesa) terhadap perubahan Alokasi Belanja Bidang pemberdayaan Masyarakat.

d. Jumlah Penduduk sebagai Variabel Moderasi Perubahan Dana Desa (DD) terhadap Perubahan Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pada variabel jumlah Penduduk sebagai pemoderasi Dana Desa (DD) terhadap Perubahan Belanja Desa Bidang pemberdayaan Masyarakat. Hasil uji t hitung diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,766 > 0,05$ sehingga H_6 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa Jumlah Penduduk tidak mampu memoderasi pengaruh Perubahan Dana Desa (DD) terhadap Perubahan Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam Pengalokasian Dana Desa (DD) pada belanja tidak mempertimbangkan Jumlah Penduduk, terbukti dalam penggunaan Dana Desa pada tahun-tahun penelitian lebih mengarah pada Belanja Infrastruktur yang memprioritaskan pada objek yaitu fasilitas sarana prasarana. Dalam pengalokasian Dana Desa (DD) terhadap Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat suatu desa yang jumlah penduduknya banyak atau sedikit tidak akan memengaruhinya, dikarenakan memang sudah ada peraturan yang mengharuskan dana Desa (DD) untuk dialokasikan untuk kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya Aditya Putra Widiagma (2015) menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh Signifikan terhadap Belanja daerah. Selanjutnya Yudi Satrya Aprizay, Darwanis dan Muhammad Arfan (2014) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu bahwa secara simultan menunjukkan bahwa PADesa, DD, dan Jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan hasil pengujian secara parsial PADesa dan Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, akan tetapi hasil riset menunjukkan bahwa DD berpengaruh secara negative signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sementara Jumlah Penduduk tidak mampu memoderasi Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan Dana Desa (DD).

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu Data yang digunakan anggaran pendapatan dan belanja desa, bukan dari data realisasi anggaran sehingga data yang terkumpul tidak mencerminkan data riil realisasi anggaran yang digunakan oleh Desa terkait. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini di Desa-Desa Kabupaten Wonogiri, sehingga penelitian ini belum dapat menjelaskan secara umum di kabupaten lainnya. Penelitian ini menggunakan variabel independen faktor internal Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang mempengaruhi belanja Desa Bidang pemberdayaan Masyarakat yaitu Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan Dana Desa (DD), Sedangkan hanya menggunakan satu variabel independen faktor eksternal berupa Jumlah penduduk, dan Data Tahun pengamatan penelitian belum

dimulainya Program Pemerintah Pusat tentang Padat Karya Tunai Desa, yang mengarahkan untuk Alokasi Belanja Desa Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk peneliti selanjutnya disarankan menggunakan data Realisasi Anggaran. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah Kota/Kabupaten yang ada di Indonesia lainnya atau dapat membandingkan daerah satu dengan daerah lainnya, dan diharapkan dapat menambah variabel-variabel lainnya yang lebih banyak mempengaruhi Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, peneliti selanjutnya juga diharapkan menggunakan data tahun terbaru untuk menguji sejauh mana Pemerintah desa dalam melaksanakan Program Padat Karya Tunai dari Pemerintah Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprizay,yudi satrya dkk.2014. “Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap pengalokasian belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi aceh”. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 3, No. 1, Februari 2014
- Devita,Andridkk.2014.“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi”. Jurnal Prespektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol.2 No.2, oktoberdesember 2014.ISSN 2338-4603.
- Ghozali, Imam. 2011. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2012. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima). Semarang : Universitas Diponegoro.
- HAW. Widjaja. 2013. Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan Utuh. Jakarta : PT. Raja Gratindo Persada
- <http://jateng.bps.go.id/>
- <http://wonogirikab.bps.go.id/>
- <https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html>
- Jaya,I.P.N.P.K dan A. A.N.B. Dwirandra 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Volume 7 Nomor 1. ISSN 2301-8556
- Margono. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mindarti, lely Indah et al. 2014. Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa (Studi pada Desa Sumber pasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP),Vol.1, No.5, Hal. 890-899| 890

- Mucharomah, E., Dan Zulfikar 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR) Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017 (Studi Empiris Desa-Desa Di-Kabupaten Wonogiri) Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Murti, R.S., dan Arifin Atwal 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR) Dan jumlah Sawah Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2017 (Studi Empiris di Desa-Desa Kabupaten Wonogiri) Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Purbasari, H., Wardana, B.W. dan Pangestu, I.A., 2018. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum dan Pertanian (Studi Empiris di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo). Proceeding of The URECOL, Hal.281-288.
- Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 21 Tahun 2015 tentang prioritas dan Desa
- Rahmawati, Luluk Atika dan Bambang Suryono. 2015. “ Flaypapaer Effect Dana Alokasi Umumdan Pendapatan Asli Daerahterhadap Belanja Daerah”. Jurnal Ilmu dan Riset akuntansi.Vol. 4 No.9.
- Singih Santoso. 2000. Latihan SPSS Statistik Parmetik Gramedia, Jakarta
- Said, Rusli. 2001. Pengantar Ilmu Kependudukan. Jakarta : Lembaga Penelitian dan engembangan Ekonomi dan sosial.
- Susanti, Susi dan Heru fahlevi. 2016. Pengaruh pendapatn Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (studi Pada Kabupaten/kota Diwilayah Aceh). Jurna Ilmiah mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol.1 No. 1
- Sugiono.2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , Bandung : Alfabeta.
- Sugiono.2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Desa.

Undang-Undang No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa.

Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Desa.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Wahyuddin. 2016. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. *e-Jurnal Katalogis*. Vol. 4 No. 5 mei 2016: 141-149. ISSN 2302-2019

Wanusmawatie, Ike et al. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa ddalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik(JAP)*. Vol. 2 No. 4: 597-602.

Wardhana, Bramudya Wisnu., Bawono 2017. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2016 (Studi Empiris di Seluruh Desa se-Kabupaten Sukoharjo)”. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Widiagma, A.P. 2015. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Skripsi. Universitas negeri Jember